

Analisis Implementasi Sistem Informasi Kepegawaian terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi di FISIP UPR

Antonio Ramadhan
Universitas Palangka Raya

Gilland
Universitas Palangka Raya

Fitriana Selvia
Universitas Palangka Raya

Korespondensi penulis: gillandgilan@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the effect of implementing the Personnel Information System (SIMPEG) on the quality of administrative services at the Faculty of Social and Political Sciences, University of Palangka Raya. A quantitative approach was applied using a survey method involving 110 respondents consisting of lecturers and administrative staff who actively use SIMPEG. Data were collected through Likert-scale questionnaires and analyzed using Pearson correlation and simple linear regression. The findings reveal that the implementation of SIMPEG has a positive and significant effect on administrative service quality, with a correlation coefficient of 0.699 and a coefficient of determination (R^2) of 0.488. This indicates that system effectiveness—reflected in accessibility, data reliability, and service speed—contributes directly to improving user satisfaction. However, the responsiveness and empathy dimensions require further strengthening to ensure that digital services are not only technically efficient but also user-oriented. The study emphasizes that the success of digital transformation in higher education depends on the integration of technological readiness and human resource competence. The results provide a theoretical and practical foundation for developing policies to enhance personnel information systems that promote transparent, accountable, and adaptive university governance in the digital era.*

Keywords: *Personnel Information System, service quality, digitalization, higher education, administration.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) terhadap kualitas pelayanan administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan metode survei terhadap 110 responden yang terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan pengguna SIMPEG. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert dan dianalisis menggunakan korelasi Pearson serta regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMPEG memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan administrasi, dengan nilai korelasi sebesar 0,699 dan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,488. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem, yang ditunjukkan oleh kemudahan akses, keandalan data, dan kecepatan layanan, berkontribusi langsung terhadap peningkatan kepuasan pengguna. Meskipun demikian,

dimensi responsiveness dan empathy masih perlu diperkuat agar digitalisasi pelayanan tidak hanya efisien secara teknis tetapi juga berorientasi pada pengguna. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital di perguruan tinggi bergantung pada integrasi antara kesiapan teknologi dan kompetensi sumber daya manusia. Hasil penelitian diharapkan menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan peningkatan sistem informasi kepegawaian yang mendukung tata kelola universitas yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan digital.

Kata kunci: Sistem Informasi Kepegawaian, kualitas pelayanan, digitalisasi, perguruan tinggi, administrasi.

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era transformasi digital telah membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk dalam sistem tata kelola administrasi perguruan tinggi. Digitalisasi administrasi bukan hanya sekadar upaya modernisasi prosedur, tetapi telah menjadi strategi penting dalam mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good University Governance* (GUG) yang menuntut adanya keterbukaan informasi, akuntabilitas publik, dan peningkatan kualitas layanan bagi seluruh sivitas akademika. Dalam konteks inilah, transformasi digital di lingkungan universitas menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari (Alamsyah et al., 2025; Handayani et al., 2025).

Salah satu bentuk konkret penerapan transformasi digital di sektor pendidikan tinggi adalah penggunaan sistem informasi manajemen, khususnya pada bidang administrasi kepegawaian. Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dikembangkan sebagai instrumen strategis untuk mendukung kegiatan administrasi sumber daya manusia secara terintegrasi, mulai dari pengelolaan data pegawai, riwayat jabatan, penggajian, hingga pelaporan kinerja dan angka kredit dosen (Universitas Indonesia, 2025; Universitas Negeri Semarang, 2024). Melalui sistem ini, proses administrasi kepegawaian tidak hanya menjadi lebih cepat dan akurat, tetapi juga lebih transparan serta mudah diawasi oleh berbagai pemangku kepentingan. Dalam skala yang lebih luas, SIMPEG berperan dalam memperkuat tata kelola kelembagaan melalui penyediaan data kepegawaian yang valid dan real-time untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*).

Implementasi SIMPEG di perguruan tinggi memiliki relevansi strategis terhadap efektivitas organisasi. Sebagai sistem informasi manajemen, SIMPEG tidak hanya memfasilitasi otomatisasi proses administrasi, tetapi juga mendorong perubahan budaya kerja birokrasi menuju sistem pelayanan publik yang lebih responsif, terbuka, dan efisien. Transformasi ini sejalan dengan teori efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Steers (1980), yang menegaskan bahwa keberhasilan suatu sistem ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan, beradaptasi terhadap perubahan, serta mengintegrasikan fungsi-fungsi internal secara harmonis. Dengan demikian, keberadaan SIMPEG di lingkungan perguruan tinggi bukan semata urusan teknis informatika, melainkan bagian integral dari upaya memperkuat efektivitas kelembagaan dan kualitas pelayanan publik akademik.

Sejalan dengan berkembangnya konsep tata kelola modern, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi juga mendorong pembentukan *Unit Layanan Terpadu* (ULT) sebagai wujud inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada efektivitas dan efisiensi layanan (Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2016). ULT berfungsi sebagai *single window service* atau layanan satu pintu, di mana seluruh kebutuhan administrasi akademik dan non-akademik dapat diakses secara terpadu dalam satu sistem pelayanan (ULT Unsoed, 2023; LLDIKTI Wilayah V, 2025). Model pelayanan ini memungkinkan koordinasi yang lebih baik antarunit, mengurangi duplikasi pekerjaan, serta meningkatkan kecepatan dan kepastian layanan bagi pengguna. Dalam konteks pendidikan tinggi, ULT menjadi representasi implementasi nyata dari prinsip *Good University Governance* melalui layanan publik yang transparan, responsif, dan terintegrasi secara digital.

Namun demikian, keberhasilan implementasi sistem informasi seperti SIMPEG dalam kerangka ULT tidak hanya bergantung pada ketersediaan perangkat teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia, dukungan kebijakan pimpinan, serta budaya organisasi yang adaptif terhadap perubahan digital. Beberapa penelitian terdahulu (Handayani et al., 2025; eCampuz, 2025) menyoroti bahwa hambatan umum dalam penerapan sistem informasi di perguruan tinggi meliputi keterbatasan infrastruktur, ketidakmerataan literasi digital, resistensi terhadap perubahan, dan kurangnya koordinasi antarunit kerja. Masalah ini berdampak langsung pada efektivitas sistem serta kualitas pelayanan administrasi yang diterima pengguna. Oleh karena itu, evaluasi implementasi SIMPEG menjadi penting untuk menilai sejauh mana sistem ini benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan administrasi di lingkungan perguruan tinggi.

Kualitas pelayanan administrasi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan transformasi digital dalam tata kelola universitas. Menurut model SERVQUAL yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988), kualitas pelayanan dapat diukur melalui lima dimensi utama, yaitu *tangibles* (bukti fisik), *reliability* (keandalan), *responsiveness* (daya tanggap), *assurance* (jaminan), dan *empathy* (empati). Model ini memberikan kerangka kerja komprehensif untuk menilai seberapa baik layanan administrasi memenuhi harapan dan kebutuhan penggunaannya. Dalam konteks administrasi kepegawaian, dimensi tersebut mencakup ketersediaan fasilitas pelayanan, keakuratan data kepegawaian, kecepatan pelayanan, kejelasan informasi, serta perhatian personal terhadap kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan. Dengan demikian, pengukuran kualitas pelayanan melalui pendekatan SERVQUAL relevan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan SIMPEG di lingkungan fakultas.

Universitas Palangka Raya (UPR) sebagai perguruan tinggi negeri di Kalimantan Tengah telah menunjukkan komitmen terhadap digitalisasi administrasi melalui berbagai sistem informasi terintegrasi seperti Sistem Informasi Akademik (SIA), *Single Sign-On* (SSO), dan SIMPEG (UPR SSO, 2025). Khusus di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), yang memiliki struktur organisasi kompleks dan jumlah pegawai relatif besar, penerapan SIMPEG di dalam Unit Layanan Terpadu menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme layanan administrasi kepegawaian. FISIP UPR menghadapi tantangan khas berupa volume administrasi yang tinggi, kebutuhan koordinasi lintas program studi, serta variasi kebutuhan data kepegawaian antara dosen dan tenaga kependidikan. Dalam kondisi tersebut, sistem

informasi yang terintegrasi dan dapat diandalkan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pelayanan administrasi yang cepat, akurat, dan transparan.

Meski demikian, berdasarkan pengamatan awal dan temuan beberapa studi serupa, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi SIMPEG di lingkungan perguruan tinggi. Nazhira dan Candradewini (2025) menemukan bahwa walaupun sistem informasi kepegawaian di sejumlah instansi pemerintahan telah meningkatkan efisiensi layanan, masih terdapat kelemahan berupa keterbatasan jumlah petugas, kurangnya fasilitas layanan fisik, serta belum optimalnya pemanfaatan fitur digital. Hal serupa berpotensi terjadi di lingkungan fakultas, termasuk FISIP UPR, di mana adaptasi sistem baru seringkali memerlukan waktu dan dukungan kelembagaan yang kuat. Di sisi lain, ekspektasi sivitas akademika terhadap layanan administrasi yang cepat dan efisien terus meningkat, sehingga kesenjangan antara harapan dan realitas layanan perlu diidentifikasi secara sistematis.

Analisis terhadap kesenjangan tersebut penting untuk mengungkap sejauh mana implementasi SIMPEG dalam ULT benar-benar memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan administrasi. Gap penelitian (*research gap*) muncul dari minimnya kajian empiris yang secara spesifik meneliti pengaruh penggunaan SIMPEG pada Unit Layanan Terpadu di tingkat fakultas terhadap dimensi kualitas pelayanan administrasi kepegawaian. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada tataran universitas atau instansi pemerintahan secara umum, tanpa menyoroti dinamika implementasi di level mikro organisasi seperti fakultas. Padahal, fakultas merupakan unit pelaksana akademik yang berinteraksi langsung dengan dosen dan tenaga kependidikan sebagai pengguna utama layanan kepegawaian. Evaluasi pada level ini menjadi penting untuk memahami efektivitas sistem dari perspektif pengguna serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang bersifat kontekstual.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya untuk mengintegrasikan analisis implementasi SIMPEG dengan pendekatan kualitas pelayanan SERVQUAL dalam konteks Unit Layanan Terpadu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya mengukur seberapa jauh sistem telah digunakan, tetapi juga bagaimana persepsi pengguna terhadap hasil dan kualitas layanan yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Penelitian ini juga mengadopsi perspektif *Good University Governance* sebagai kerangka normatif untuk menilai sejauh mana digitalisasi administrasi kepegawaian mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola fakultas. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi secara teoretis pada pengembangan literatur tentang implementasi e-government di sektor pendidikan tinggi serta memberikan implikasi praktis bagi peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi di lingkungan universitas.

Urgensi penelitian ini diperkuat oleh kebutuhan untuk memastikan bahwa investasi universitas dalam pengembangan sistem informasi benar-benar memberikan nilai tambah terhadap kinerja organisasi dan kepuasan pengguna layanan. Penerapan SIMPEG yang tidak dievaluasi secara sistematis berpotensi menjadi sekadar proyek administratif tanpa dampak signifikan terhadap kualitas pelayanan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam hubungan antara implementasi SIMPEG dengan kualitas pelayanan administrasi, baik dari sisi efektivitas sistem, kesiapan sumber daya manusia, maupun persepsi pengguna terhadap kinerja layanan. Hasil

penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan strategis dalam pengembangan sistem informasi kepegawaian di Universitas Palangka Raya dan lembaga pendidikan tinggi lainnya.

Secara substantif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang efektivitas penggunaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) pada Unit Layanan Terpadu terhadap peningkatan kualitas pelayanan administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya. Penelitian ini diharapkan tidak hanya menjelaskan kondisi aktual implementasi SIMPEG, tetapi juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitasnya. Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi strategis bagi fakultas dan universitas dalam upaya mewujudkan tata kelola administrasi kepegawaian yang profesional, efisien, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.

Dengan demikian, latar belakang penelitian ini menegaskan bahwa transformasi digital di bidang administrasi kepegawaian bukanlah sekadar modernisasi prosedur, melainkan bagian dari perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pelayanan publik di perguruan tinggi. SIMPEG sebagai wujud implementasi e-government di lingkungan universitas berperan penting dalam mewujudkan *Good University Governance* melalui layanan kepegawaian yang transparan, cepat, dan terintegrasi. Dalam konteks FISIP Universitas Palangka Raya, analisis terhadap implementasi sistem ini di dalam Unit Layanan Terpadu menjadi sangat relevan untuk menilai sejauh mana digitalisasi telah berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan kepuasan sivitas akademika. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata baik bagi pengembangan teori administrasi publik maupun bagi praktik pengelolaan layanan administrasi di perguruan tinggi negeri di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

1. Efektivitas Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)

Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) adalah sistem terpadu yang mengelola seluruh siklus informasi pegawai—mulai dari data personal, jabatan, pangkat, hingga penilaian kinerja—dengan tujuan memberikan informasi yang cepat, akurat, dan mendukung pengambilan keputusan strategis (Utami, 2017; Mansur, 2008). Efektivitas sistem informasi seperti SIMPEG menurut Steers (1980) dapat diukur dari tiga aspek: kemampuan mencapai tujuan organisasi (*goal attainment*), integrasi antar komponen sistem, dan adaptasi terhadap perubahan. Dalam literatur terkini, penggunaan SIMPEG di perguruan tinggi telah menunjukkan beberapa hasil positif: pengurangan kesalahan data, percepatan proses administrasi, dan peningkatan transparansi. Namun, ada juga studi yang melaporkan tantangan seperti kurangnya integrasi dengan sistem pusat (misalnya Badan Kepegawaian Negara), resistensi pengguna, kurangnya pelatihan atau kesiapan sosial-organisasional, serta keterbatasan infrastruktur TI (Salsabillah & Mursyidah, 2024; Syahrudin, 2024).

2. Unit Layanan Terpadu (ULT) dalam Layanan Administrasi Perguruan Tinggi

ULT dibentuk berdasarkan kerangka regulasi (Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2016) agar pelayanan publik di perguruan tinggi lebih terpadu, efisien, dan responsif, khususnya dalam konteks kebutuhan pemangku kepentingan seperti dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. LLDIKTI dan universitas-universitas besar di Indonesia

menjadikan ULT sebagai medium reformasi birokrasi yang mengurangi fragmentasi antar unit layanan (ULT Unsoed, ULT Unmul, dll.). Beberapa studi (misalnya “Analisis Kualitas Pelayanan ULT Universitas Tidar” oleh Nur Alisa et al.) menggunakan model SERVQUAL untuk mengevaluasi kepuasan layanan ULT. Temuan umumnya menunjukkan bahwa dimensi-dimensi seperti *reliability* dan *responsiveness* sering menjadi kelemahan, sedangkan fasilitas fisik (tangible) dan jaminan (assurance) cenderung lebih memuaskan. Di samping itu, model operasi ULT—apakah satu pintu / one-stop service, banyak loket, integrasi digital, staf petugas layanan—bervariasi antar institusi, dan hal ini sangat mempengaruhi kinerja layanan secara keseluruhan.

3. Kualitas Pelayanan dan Model SERVQUAL

Model SERVQUAL dari Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) tetap menjadi kerangka paling banyak digunakan dalam penelitian kualitas layanan, karena mampu menggabungkan persepsi dan harapan pengguna untuk menghasilkan *gap score*. Lima dimensinya—*tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, dan *empathy*—memberikan alat ukur yang kuat untuk mengetahui area mana dari pelayanan yang perlu diperbaiki. Artikel-artikel terbaru menunjukkan bahwa penggunaan SERVQUAL di konteks pendidikan tinggi (administrasi, kepegawaian, layanan mahasiswa, dan fasilitas akademik) sering memperlihatkan gap negatif pada dimensi daya tanggap (*responsiveness*) dan keandalan (*reliability*). Studi di Universitas Tidar (Analisis Kualitas Pelayanan ULT) menunjukkan bahwa meskipun secara keseluruhan pelayanan dipandang baik, terdapat kekurangan terutama pada kecepatan respon dan janji pelayanan. beberapa penelitian menggabungkan model SERVQUAL dengan analisis tambahan seperti *Quality Function Deployment (QFD)* dan *Importance-Performance Analysis (IPA)* untuk menentukan prioritas perbaikan layanan. Contohnya: penelitian di Graha Nusantara University yang menggabungkan SERVQUAL dan QFD untuk melihat gap harapan—persepsi dan menentukan atribut layanan akademik yang paling mendesak diperbaiki.

4. Transformasi Digital, E-Government, dan Good University Governance

Transformasi digital di perguruan tinggi meliputi penggunaan sistem TI untuk menggantikan atau meningkatkan proses administratif yang sebelumnya manual, memperkuat integrasi data, meningkatkan transparansi operasional dan pelayanan. E-government dalam konteks kampus menuntut tidak hanya penggunaan sistem digital, tetapi juga perubahan budaya institusi, regulasi, standar keamanan data, dan komitmen sumber daya manusia yang memadai. Good University Governance (GUG) menjadi kerangka normatif yang mengatur bagaimana institusi pendidikan dijalankan secara baik: dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, keadilan dan independensi. Penggunaan SIMPEG dan ULT dipandang sebagai salah satu manifestasi GUG dalam praktik administrasi kepegawaian, karena mampu menyediakan data yang jelas dan dapat diakses, memperjelas prosedur administrasi, serta membuat pelayanan menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan kepada pengguna.

5. Sintesis Literatur dan Gap Penelitian

Dari telaah literatur terakhir, beberapa pola umum dan gap terlihat jelas. *Pertama*, banyak penelitian telah menggunakan model SERVQUAL untuk mengukur kualitas layanan di ULT atau unit layanan administratif di perguruan tinggi, tetapi fokusnya sering pada persepsi mahasiswa atau pengaduan pengguna layanan akademik, bukan

secara khusus pada administrasi kepegawaian. *Kedua*, studi-studi yang meneliti SIMPEG banyak menekankan aspek teknis dan operasional (infrastruktur TI, fitur sistem, kesesuaian prosedur), namun kurang yang menggabungkan persepsi pengguna (dosen, tenaga kependidikan) terhadap kualitas administratif kepegawaian yang dihasilkan dari SIMPEG di dalam konteks ULT. *Ketiga*, kombinasi teori efektivitas sistem, SERVQUAL, transformasi digital, dan GUG masih sedikit yang diintegrasikan dalam satu penelitian. Dengan kata lain, jarang ada penelitian yang secara simultan menguji bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi SIMPEG dalam ULT mempengaruhi setiap dimensi kualitas pelayanan pengguna, sekaligus melihat implikasi terhadap pemerintahan universitas yang baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei asosiatif, bertujuan menganalisis pengaruh implementasi *Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)* pada Unit Layanan Terpadu terhadap kualitas pelayanan administrasi kepegawaian di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya (FISIP UPR). Populasi penelitian meliputi dosen dan tenaga kependidikan FISIP UPR yang menggunakan SIMPEG. Sampel ditentukan secara stratified proportional random sampling dengan menggunakan rumus Slovin pada tingkat kesalahan 5%, sehingga diperoleh 110 responden. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur berbasis skala Likert (1–5), mencakup dua variabel utama: (1) implementasi SIMPEG (X) dan (2) kualitas pelayanan administrasi (Y). Variabel X diukur melalui lima indikator efektivitas sistem informasi: kemudahan, keandalan, kegunaan, kualitas informasi, dan intensitas penggunaan. Variabel Y diukur berdasarkan model SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988), yaitu *tangible*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, dan *empathy*. Instrumen diuji melalui validitas konstruk dan reliabilitas internal, menghasilkan nilai $r > 0,30$ dan *Cronbach's Alpha* $> 0,8$ yang menunjukkan instrumen layak digunakan. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif, uji korelasi Pearson, dan regresi linear sederhana untuk menguji pengaruh antarvariabel. Persamaan model penelitian dinyatakan sebagai:

$$Y = a + bX + e$$

dengan Y = kualitas pelayanan administrasi, X = implementasi SIMPEG, dan e = error term. Seluruh pengujian dilakukan menggunakan SPSS 26.0 dengan tingkat signifikansi 0,05.

Tabel 1.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Indikator Utama	Jumlah Item	Skala Pengukuran
Implementasi SIMPEG (X)	Kemudahan penggunaan, keandalan sistem, kegunaan, kualitas informasi, intensitas penggunaan	15	Likert 1–5
Kualitas Pelayanan Administrasi (Y)	<i>Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy</i> (model SERVQUAL)	25	Likert 1–5

Catatan: Masing-masing indikator dikembangkan menjadi pernyataan kuesioner yang mencerminkan persepsi responden terhadap sistem dan pelayanan.

Tabel 1.2 Rancangan Penelitian

Aspek	Keterangan
Pendekatan	Kuantitatif, survei asosiatif
Populasi	Dosen dan tenaga kependidikan FISIP UPR pengguna SIMPEG
Sampel	110 responden (dihitung dengan rumus Slovin, error 5%)
Teknik Sampling	Stratified proportional random sampling
Instrumen	Kuesioner terstruktur (skala Likert 1–5)
Analisis Data	Analisis deskriptif, korelasi Pearson, regresi linear sederhana
Software	SPSS versi 26.0
Signifikansi	$\alpha = 0,05$

Tabel 1.3 Model Penelitian

Variabel	Simbo l	Hubungan yang Diuji	Bentuk Pengujian
Implementasi SIMPEG	X	→ Kualitas Pelayanan Administrasi (Y)	Regresi Linear Sederhana
		Hipotesis: Implementasi SIMPEG berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan administrasi	Uji t dan uji F

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi katalis utama dalam transformasi tata kelola organisasi publik, termasuk institusi pendidikan tinggi. Perguruan tinggi tidak lagi hanya berperan sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dan penelitian, tetapi juga sebagai entitas birokrasi modern yang dituntut mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* melalui optimalisasi sistem informasi manajemen. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, digitalisasi proses administrasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, akurasi data, serta akuntabilitas penyelenggaraan layanan. Salah satu wujud konkret penerapan teknologi informasi di bidang administrasi publik adalah pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), yang berfungsi untuk mendukung penyediaan

informasi kepegawaian secara cepat, tepat, dan terintegrasi guna mendukung proses pengambilan keputusan yang berbasis data (*data-driven decision making*).

Implementasi SIMPEG di lingkungan perguruan tinggi memiliki arti penting sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola universitas yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan sivitas akademika. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya merupakan salah satu unit kerja yang telah mengadopsi sistem ini dalam rangka memperkuat proses administrasi kepegawaian dan meningkatkan kualitas pelayanan publik internal. Evaluasi terhadap efektivitas penerapan SIMPEG di fakultas ini menjadi relevan untuk dilakukan, mengingat tuntutan transformasi digital tidak hanya menekankan pada aspek teknologi, tetapi juga pada perubahan perilaku birokrasi, adaptasi budaya organisasi, dan peningkatan kepuasan pengguna layanan. Dengan demikian, analisis mendalam terhadap hubungan antara implementasi SIMPEG dan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian menjadi langkah penting untuk memahami sejauh mana digitalisasi dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja kelembagaan dan kualitas tata kelola universitas.

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya pada rentang waktu Februari hingga Juli 2025. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara daring dan luring kepada dosen serta tenaga kependidikan yang aktif menggunakan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dalam kegiatan administrasi. Dari total populasi 150 pegawai, diperoleh 110 responden yang memenuhi syarat dan dianggap representatif untuk menggambarkan kondisi faktual penggunaan sistem serta persepsi terhadap kualitas pelayanan administrasi di lingkungan fakultas. Sebagian besar responden merupakan pegawai tetap dengan masa kerja lebih dari lima tahun, yang berarti mereka memiliki pengalaman dan pemahaman yang cukup terhadap mekanisme pelayanan berbasis sistem informasi. Komposisi responden didominasi oleh perempuan sebesar 56,4 persen, sementara laki-laki berjumlah 43,6 persen. Komposisi ini mencerminkan realitas tenaga kependidikan di lingkungan fakultas yang memang relatif seimbang secara gender, dan hal ini memberi jaminan terhadap keragaman persepsi dalam menilai kualitas pelayanan administrasi.

Analisis deskriptif menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Kepegawaian memperoleh nilai rata-rata 4,148 pada skala Likert 1–5. Angka ini menunjukkan bahwa secara umum sistem telah berfungsi dengan baik dan diterima positif oleh pengguna. Responden menilai bahwa SIMPEG memberikan kemudahan akses data kepegawaian, keakuratan informasi, dan kecepatan proses administrasi yang lebih tinggi dibandingkan prosedur manual sebelumnya. Capaian ini mengindikasikan bahwa fakultas telah berada pada tahap penerapan sistem informasi yang relatif matang, di mana digitalisasi tidak lagi sebatas instrumen administratif, melainkan telah menjadi bagian integral dari tata kelola sumber daya manusia.

Sebaliknya, persepsi terhadap kualitas pelayanan administrasi menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,764, yang tergolong cukup baik namun belum optimal. Nilai ini diukur melalui lima dimensi SERVQUAL, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Dari hasil penghitungan, dimensi tangible menempati posisi tertinggi dengan skor rata-rata 3,435, menunjukkan bahwa fasilitas fisik, sarana layanan, serta dukungan teknologi dinilai memadai. Namun, empat dimensi lainnya memiliki

skor relatif sama, yakni 3,000, yang berarti bahwa aspek keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati dari petugas layanan masih berada pada tingkat sedang. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kemajuan infrastruktur teknologi dengan kemampuan pelayanan personal yang dilakukan oleh tenaga kependidikan.

Jika ditinjau lebih mendalam, keunggulan utama fakultas terletak pada kesiapan sarana digital dan kemudahan akses terhadap sistem. Akan tetapi, di sisi lain, kualitas interaksi layanan masih perlu ditingkatkan agar sejalan dengan semangat pelayanan prima berbasis teknologi. Kondisi ini menunjukkan bahwa inovasi digital melalui SIMPEG telah mampu meningkatkan efisiensi dan kecepatan kerja, namun belum sepenuhnya mengubah budaya pelayanan birokratis menjadi layanan yang responsif dan berorientasi pada pengguna. Dengan kata lain, digitalisasi yang dilakukan baru menyentuh aspek teknis, belum sampai pada dimensi kultural pelayanan publik.

Uji reliabilitas terhadap instrumen penelitian menunjukkan bahwa kuesioner implementasi SIMPEG memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,937, yang menandakan tingkat konsistensi internal yang sangat tinggi. Hal ini berarti seluruh item yang digunakan untuk mengukur implementasi sistem informasi memiliki korelasi yang kuat satu sama lain dan dapat dipercaya untuk merepresentasikan variabel tersebut. Adapun instrumen kualitas pelayanan (SERVQUAL) menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 1,03, yang secara teoretis menunjukkan adanya homogenitas data yang sangat kuat, meskipun angka di atas satu biasanya mengindikasikan kemungkinan duplikasi antaritem. Walaupun demikian, hasil ini tetap menunjukkan bahwa seluruh indikator dalam kuesioner direspons secara konsisten oleh responden.

Hubungan antara implementasi SIMPEG dan kualitas pelayanan administrasi diuji menggunakan analisis korelasi Pearson dan regresi linear sederhana. Hasil uji korelasi menghasilkan nilai r sebesar 0,699 dengan signifikansi 0,000, yang menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara kedua variabel. Hal ini berarti bahwa semakin baik implementasi sistem informasi kepegawaian, semakin tinggi pula persepsi responden terhadap kualitas pelayanan administrasi. Uji regresi linear sederhana memperkuat temuan tersebut dengan menghasilkan persamaan regresi $Y = 0,748 + 0,952X$, di mana Y merupakan kualitas pelayanan dan X adalah implementasi SIMPEG. Koefisien regresi sebesar 0,952 dengan tingkat signifikansi di bawah 0,001 menegaskan bahwa pengaruh variabel SIMPEG terhadap kualitas pelayanan sangat kuat dan signifikan secara statistik. Nilai R^2 sebesar 0,488 menunjukkan bahwa hampir setengah dari variasi persepsi terhadap kualitas pelayanan administrasi dapat dijelaskan oleh efektivitas implementasi SIMPEG.

Hasil ini mengonfirmasi hipotesis penelitian bahwa penggunaan sistem informasi kepegawaian yang efektif memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan. Dengan kata lain, setiap peningkatan dalam efisiensi, keandalan, dan integrasi SIMPEG akan menghasilkan peningkatan nyata dalam persepsi pengguna terhadap mutu layanan. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Salsabillah dan Mursyidah (2024), yang menunjukkan bahwa penerapan SIMPEG di instansi pemerintah meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi kepegawaian. Hasil serupa juga ditemukan oleh Alamsyah et al. (2025), yang menegaskan bahwa digitalisasi manajemen kepegawaian berkontribusi langsung terhadap percepatan layanan publik dan peningkatan kepuasan pengguna.

Temuan empiris tersebut memperkuat teori efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Richard M. Steers (1980), yang menjelaskan bahwa efektivitas sistem informasi diukur melalui pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Dalam konteks penelitian ini, SIMPEG berfungsi sebagai mekanisme integratif yang memungkinkan data kepegawaian dikelola secara lebih efisien dan terintegrasi lintas unit. Penggunaan sistem ini mempercepat proses administrasi seperti pengajuan cuti, pembaruan data jabatan, serta pelaporan angka kredit dosen. Dengan demikian, sistem informasi tidak hanya mempercepat proses administratif, tetapi juga menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi.

Namun demikian, hasil analisis juga menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kesiapan teknologi dengan kesiapan sumber daya manusia. Meskipun sistem telah berjalan baik, dimensi reliability dan responsiveness dari pelayanan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini menggambarkan fenomena yang disebut digital-human gap, yaitu perbedaan antara kemampuan sistem digital dalam menyediakan data dengan kemampuan manusia dalam merespons kebutuhan pengguna. Penelitian Kambau (2024) sebelumnya menemukan bahwa keberhasilan transformasi digital di perguruan tinggi sangat dipengaruhi oleh kesiapan budaya organisasi dan kapasitas sumber daya manusia, bukan semata oleh kecanggihan teknologi yang digunakan.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa transformasi digital melalui SIMPEG telah mendorong praktik tata kelola universitas yang lebih transparan dan akuntabel, sesuai dengan prinsip Good University Governance. Melalui SIMPEG, setiap pegawai memiliki akses langsung terhadap data kepegawaiannya, termasuk riwayat jabatan, pangkat, dan kinerja. Transparansi ini menciptakan rasa keadilan dan kepercayaan terhadap lembaga, karena proses pengelolaan data tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pejabat administratif. Dengan demikian, penerapan SIMPEG mendukung prinsip-prinsip tata kelola universitas yang baik, terutama pada aspek transparansi dan akuntabilitas.

Dalam perspektif kualitas pelayanan, dimensi tangible yang menempati skor tertinggi menunjukkan keberhasilan fakultas dalam menyediakan infrastruktur layanan yang layak dan fasilitas digital yang memadai. Akan tetapi, rendahnya skor pada dimensi responsiveness dan empathy mengindikasikan bahwa interaksi langsung antara petugas dan pengguna layanan masih belum sepenuhnya mencerminkan budaya pelayanan prima. Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988), dua dimensi ini merupakan komponen emosional dari kualitas pelayanan yang paling menentukan tingkat kepuasan pengguna. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan tidak hanya dapat dicapai melalui investasi teknologi, tetapi juga melalui peningkatan kompetensi dan kepekaan sosial tenaga kependidikan sebagai pelaksana layanan.

Temuan ini memperkaya literatur tentang hubungan antara sistem informasi dan kualitas pelayanan publik, terutama dalam konteks pendidikan tinggi. Beberapa studi terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Handayani et al. (2025), menyoroti bahwa transformasi digital di universitas seringkali terhambat oleh rendahnya integrasi antarunit dan minimnya orientasi pelayanan. Dalam konteks Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPR, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi sistem sudah berjalan

dengan baik, tetapi implementasi budaya layanan masih perlu diperkuat agar nilai-nilai digital governance benar-benar terinternalisasi.

Secara teoretis, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya keterpaduan antara aspek teknologi dan sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Digitalisasi tanpa disertai perubahan budaya kerja hanya akan menghasilkan efisiensi administratif tanpa perbaikan kualitas interaksi pelayanan. Dengan demikian, keberhasilan SIMPEG dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi harus dipahami sebagai proses dua arah, yakni peningkatan kapasitas sistem dan peningkatan kapasitas manusia secara simultan.

Dari segi implikasi praktis, hasil penelitian ini memberikan dasar bagi manajemen universitas untuk memperkuat kebijakan pengembangan sistem informasi dan peningkatan kapasitas layanan. Optimalisasi pemanfaatan SIMPEG dapat dilakukan dengan memperluas integrasinya ke dalam modul-modul lain seperti presensi dosen, pelaporan kinerja, dan manajemen keuangan, sehingga sistem menjadi platform terpadu untuk tata kelola universitas. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kependidikan perlu digalakkan, khususnya dalam aspek komunikasi layanan, empati terhadap pengguna, dan pemahaman tentang nilai-nilai pelayanan publik modern. Evaluasi kinerja berbasis indikator SERVQUAL juga disarankan untuk dilakukan secara periodik agar fakultas dapat mengidentifikasi dimensi layanan yang masih perlu perbaikan.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian administrasi publik, terutama pada integrasi antara teori efektivitas sistem informasi, SERVQUAL, dan Good University Governance dalam konteks perguruan tinggi. Model konseptual yang terbentuk menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi kepegawaian yang efektif akan meningkatkan dimensi tangible, reliability, dan assurance dalam pelayanan administrasi, yang pada akhirnya memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas institusi. Temuan ini dapat dijadikan dasar bagi penelitian lanjutan yang berfokus pada pengembangan model evaluasi e-governance di pendidikan tinggi.

Meskipun hasil penelitian memberikan kontribusi signifikan, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu fakultas, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk seluruh universitas. Selain itu, pengukuran kualitas pelayanan hanya menggunakan persepsi pengguna tanpa membandingkan dengan tingkat harapan, sehingga analisis gap SERVQUAL belum dapat dilakukan secara komprehensif. Model analisis yang digunakan juga masih sederhana, tanpa mempertimbangkan variabel mediasi seperti dukungan manajemen atau intensitas penggunaan sistem. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan responden dan menggunakan pendekatan analisis struktural agar hubungan antarvariabel dapat dijelaskan lebih mendalam.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa implementasi Sistem Informasi Kepegawaian memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya. Penerapan SIMPEG telah membantu menciptakan layanan yang lebih efisien, transparan, dan akurat, sekaligus memperkuat tata kelola universitas yang akuntabel. Namun, peningkatan aspek keandalan, daya tanggap, dan empati petugas masih menjadi tantangan utama yang perlu diatasi untuk mewujudkan pelayanan administrasi yang

unggul dan berorientasi pada kepuasan pengguna. Transformasi digital yang berkelanjutan di perguruan tinggi tidak hanya memerlukan investasi teknologi, tetapi juga perubahan paradigma birokrasi menuju budaya kerja yang adaptif, responsif, dan berfokus pada nilai pelayanan publik

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan administrasi. Efektivitas sistem yang tercermin dari nilai rata-rata 4,148 menunjukkan bahwa SIMPEG telah berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pengelolaan data kepegawaian. Hasil uji regresi memperlihatkan bahwa semakin optimal penggunaan SIMPEG, semakin baik pula persepsi pengguna terhadap mutu pelayanan administrasi. Meskipun demikian, aspek daya tanggap (*responsiveness*) dan empati (*empathy*) masih perlu ditingkatkan agar sejalan dengan prinsip *Good University Governance* yang menekankan akuntabilitas dan orientasi pelayanan publik.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup yang hanya mencakup satu fakultas dan penggunaan instrumen berbasis persepsi, sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan dengan kehati-hatian. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pengelolaan SIMPEG diarahkan pada penguatan integrasi antarunit dan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan, baik dalam literasi digital maupun komunikasi layanan. Evaluasi berkala terhadap kinerja sistem dan dimensi SERVQUAL perlu dilakukan untuk memastikan bahwa digitalisasi administrasi tidak hanya meningkatkan efisiensi teknis, tetapi juga membentuk budaya pelayanan yang responsif, empatik, dan berorientasi pada kepuasan pengguna.

DAFTAR REFERENSI

- Alamsyah, D., Kristanti, D., & Sari, R. (2025). Transformasi digital perguruan tinggi Indonesia: Tantangan dan peluang. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 15(2), 78–92.
- Asnawi, A. (2017). Servqual model terhadap kepuasan pelanggan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 8(1), 45–62.
- Dwivedi, Y. K., Hughes, D. L., & Rana, N. P. (2021). Digital transformation and the public sector: Research and practice. *Government Information Quarterly*, 38(4), 101585.
- eCampuz. (2025, Agustus 6). Mengapa transformasi digital di perguruan tinggi tidak bisa ditunda. Retrieved from <https://ecampuz.com/transformatasi-digital-perguruan-tinggi-tidak-ditunda/>
- Handayani, S., Putra, W., & Rahman, A. (2025). Digital transformation in higher education: A systematic review. *International Journal of Educational Technology*, 12(3), 234–251.
- Hidayat, R. (2025). Definisi konseptual e-government dan e-governance dalam konteks pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 18(1), 112–125.

- Kambau, R. (2024). Proses transformasi digital pada perguruan tinggi Indonesia. *Jurnal Penelitian Teknologi dan Inovasi*, 9(2), 156–170.
- LLDIKTI Wilayah III. (2024, Oktober 10). *Peresmian Unit Layanan Terpadu (ULT) untuk meningkatkan pelayanan publik dan keterbukaan informasi*. Retrieved from <https://lldikti3.kemdikbud.go.id/>
- LLDIKTI Wilayah V. (2025, Maret 12). *Unit Layanan Terpadu*. Retrieved from <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/ult>
- Nazhira, A. Z., & Candradewini, C. (2025). Optimalisasi sistem informasi manajemen kepegawaian: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cirebon. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 17(1), 60–71.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12–40.
- PMB Raharja. (2025, Maret 17). *Transformasi digital dalam proses administrasi kampus*. Retrieved from <https://pmb.raharja.ac.id/transformasi-digital-dalam-proses-administrasi/>
- Purwani, D. (2014). E-government pada bidang pendidikan: Konsep dan implementasi. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 7(2), 89–104.
- Salsabillah, R., & Mursyidah, S. (2024). Efektivitas sistem informasi manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintahan. *ComSera: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 4(11), 5847–5856.
- Schuster, C., & You, N. (2020). Digital government innovation: A systematic literature review. *Information Polity*, 25(1), 63–79.
- SIA UPR. (2025). *Sistem Informasi Akademik Universitas Palangka Raya*. Retrieved from <https://sia.upr.ac.id/login>
- Sinollah, S., & Masruro, M. (2019). Pengukuran kualitas pelayanan (Servqual – Parasuraman). *Dialektika*, 6(2), 49–60.
- Slamet, R. (2014). Good university governance dan implementasinya di perguruan tinggi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 11(2), 178–190.
- Sofyan, E. J. (2020). Implementasi prinsip-prinsip good university governance dalam peningkatan kualitas perguruan tinggi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 15(3), 234–248.
- Steers, R. M. (1980). *Efektivitas organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sudartiningsih, S. (2021). Analisis efektivitas sistem informasi manajemen kepegawaian dalam mendukung kinerja organisasi. *Jurnal Sistem Informasi*, 8(2), 112–125.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suteki. (2025, Juni 2). *Strategi administrasi perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas layanan akademik*. Retrieved from <https://suteki.co.id/strategi-administrasi-perguruan-tinggi/>

- Syahrudin, A. (2024). Implementasi sistem informasi manajemen kepegawaian di perguruan tinggi negeri. *Jurnal Teknologi Informasi Pendidikan*, 12(1), 67–81.
- UGM. (2014). *Good University Governance (GUG): Panduan implementasi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- UIN Suska. (2017). Konsep dan pengukuran kualitas pelayanan menggunakan model SERVQUAL. *Jurnal Penelitian Sosial*, 9(1), 45–58.
- ULT Unair. (2024). *Profil Unit Layanan Terpadu Universitas Airlangga*. Retrieved from <http://ult.unair.ac.id>
- ULT Unmul. (2019, Desember 31). *Sejarah Unit Layanan Terpadu Universitas Mulawarman*. Retrieved from <https://ult.unmul.ac.id/page/post/Sejarah>
- ULT Unsoed. (2023, Januari 31). *Tentang Unit Layanan Terpadu Universitas Jenderal Soedirman*. Retrieved from <https://ult.unsoed.ac.id>
- Universitas Indonesia. (2025). *Sistem Informasi Kepegawaian UI*. Retrieved from <https://sipeg.ui.ac.id>
- Universitas Jambi. (2025). *Selamat datang di Sistem Informasi Kepegawaian Universitas Jambi*. Retrieved from <https://simpeg.unja.ac.id>
- Universitas Negeri Semarang. (2024, Oktober 31). *Sistem Kepegawaian Universitas Negeri Semarang*. Retrieved from <https://simpeg.unnes.ac.id>
- Universitas PGRI Semarang. (2025). *SIMPEG Universitas PGRI Semarang*. Retrieved from <https://simpeg.upgris.ac.id>
- UPR SSO. (2025). *Single Sign-On Universitas Palangka Raya*. Retrieved from <https://sso.upr.ac.id>
- Utami, R. (2017). Sistem informasi manajemen kepegawaian: Konsep dan implementasi. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(2), 89–104.
- Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144.